

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Kepariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk dikembangkan dalam dewasa ini, karena mengingat bagaimana kontribusi dari sektor ini terhadap pendapatan dari suatu daerah. Untuk menyikapi ini sangat diperlukan bagaimana prioritas kita terhadap pengembangan serta pengelolaan sektor pariwisata, sehingga potensi yang ada benar-benar bisa dioptimalkan. Dalam proses pengelolaan pariwisata ini sendiri sangat bergantung kepada bagaimana kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan potensi yang ada, sehingga tepat pada sisi inilah yang menjadi titik sentral dari sektor ini dalam proses pengembangan dan pengelolanya agar bisa memperoleh *output* yang lebih dalam pemasukan dan pendapatan suatu daerah.

Pariwisata mampu memberikan kemajuan bagi suatu daerah, jika daerah tersebut mampu mengelola setiap potensi pariwisata yang dimiliki. Sektor pariwisata ini juga bisa menjadi penopang bagi perekonomian dari masyarakat jika sektor ini benar-benar bisa dikembangkan. Sehingga berangkat dari soal ini sangat diperlukan perhatian khusus dari pemerintah melalui kebijakan dalam menata dan mengembangkan setiap potensi pariwisata yang ada. Dalam konteks pariwisata kebijakan itu hadir untuk bagaimana mengatur, menata, serta mengembangkan setiap potensi-potensi pariwisata yang ada

tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan kepariwisataan banyak sekali ditemukan permasalahan serta hambatan-hambatan yang ditemui seperti peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, serta aspek lingkungan yang menjadi sasaran dari pariwisata itu sendiri.

Malang merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, kota Malang merupakan salah satu kota yang maju di bidang pendidikan. Jumlah kampus di Malang sangat banyak. Sehingga kota Malang menjadi salah satu kota yang diminati sebagai tempat untuk menempu pendidikan ditingkat lanjut. Disamping itu selain sektor pendidikan salah satu yang paling menonjol di kota Malang adalah sektor pariwisata, Malang adalah salah satu kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terletak di dataran tinggi, berjarak sekitar 90 km dari kota Surabaya. Karena letaknya yang tinggi, kota ini memiliki udara yang sejuk dan nyaman untuk dikunjungi.

Untuk di kota Malang sendiri sektor pariwisata merupakan salah satu posisi yang sangat strategis untuk terus dikembangkan, karena banyaknya potensi-potensi pariwisata yang ada dan juga kota Malang yang sejuk dan nyaman untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Beberapa tahun terakhir pemerintah kota Malang sudah mulai gencar-gencar untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam mengembangkan serta mengelola tempat-tempat wisata di kota Malang misalnya, melalui penataan fasilitas pariwisata, perbaikan infrastruktur untuk memperlancar akses menuju tempat-tempat wisata, dan melakukan promosi tempat-tempat wisata yang ada sehingga bisa

diketahui oleh banyak orang. Kemudian untuk mengatur terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah kota Malang membuat regulasi khusus yang mengatur terkait dengan keberlangsungan pariwisata, yang dimana dibuatnya Peraturan daerah nomor 11 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Regulasi ini berisi peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan proses penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Malang, mulai dari proses perizinan tempat-tempat wisata sampai kepada soal penataan fasilitas fasilitas penopang dari pariwisata itu sendiri.

Regulasi ini juga sebagai bentuk keseriusan dari Pemerintah daerah Kota Malang dalam mengembangkan pariwisata di Kota Malang dengan dasar pertimbangan bahwa untuk pengembangan tempat-tempat wisata, tempat hiburan umum maupun tempat-tempat hiburan tertentu merupakan aset-aset yang strategis untuk di kelola dalam rangka pemenuhan dan meningkat perekonomian masyarakat Kota Malang. Kedua dalam upaya pengembangan usaha-usaha ekonomi, sangat perlu didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka keberadaan tempat-tempat rekreasi, tempat hiburan umum dan juga tempat hiburan tertentu haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama dan sosial. Berangkat dari beberapa poin diatas kita bisa melihat bahwa secara formil terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Malang sudah diatur secara ketat dan selanjutnya bagaimana peneliti mengukur sejauh mana efektifitas dari regulasi ini dalam implementasinya dilapangan, karena untuk mengukur terkait keberhasilan dari suatu peraturan atau sebuah kebijakan

terletak pada implementasinya. Dalam artian sejauh mana *ouput* yang didapat setelah regulasi atau kebijakan tersebut diterapkan.

Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan implementasinya. Dalam artian bahwa untuk mengukur suatu kebijakan atau regulasi yang dibuat, itu terletak pada implementasinya dilapangan. Proses implementasi kebijakan atau regulasi hanya dapat dimulai apa bila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang, dan sejumlah dana telah di alokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Secara regulasi perda ini merupakan bentuk penyempurnaan dari perda sebelumnya yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 2010, yang dimana dengan pertimbangan bahwa dengan adanya pembaharuan, maka Perda yang mengatur terkait dengan kepariwisataan ini bisa menjawab setiap persoalan yang terus berkembang. Tapi yang menjadi penekanan adalah bagaimana Implementasi dari peraturan daerah ini, kira-kira apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kota Malang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin peneliti capai adalah

1. Mengetahui implementasi kebijakan pariwisata di Kota Malang berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Mengetahui hambatan dalam implelementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis yaitu, sumbangan pengetahuan terhadap keilmuan kebijakan publik terutama dalam implelementasi suatu kebijakan atau regulasi
2. Manfaat praktis yaitu, sumbangan bagi masyarakat kota Malang agar lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kota Malang. Serta bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada, terutama yang berkaitan pengembangan perekonomian.